



## KATA PENGANTAR

---

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai acuan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini serta diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta menjadi pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Disadari bahwa hasil yang telah dicapai masih jauh dari harapan dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, maka perlu upaya lebih keras dan terkoordinasi serta komitmen dari seluruh staf dan pimpinan untuk terus meningkatkan hasil yang telah dicapai.

Semoga Rencana Kerja tahun 2018 ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam rangka penyusunan program, kegiatan dan kebijakan pembangunan di bidang Perhubungan di masa yang akan datang.

Banjarbaru,     Februari 2018  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Banjarbaru

**AHMAD YANI, S.Sos MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641102 198903 1 006



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	<b>ii</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	1
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
	1.4 SistematikaPenulisan .....	3
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU...</b>	<b>4</b>
	1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu .....	4
	2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	10
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>	<b>11</b>
	3.1 Tujuan dan SasaranRenja SKPD.....	11
	3.2 Program dan Kegiatan.....	12
<b>BAB III</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>18</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **1.1 Latar Belakang.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat dokumen rencana pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Untuk itu Perlu disusun Pedoman Penyusunan Renja SKPD sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah. Sehingga diharapkan seluruh SKPD Kota Banjarbaru dapat menyusun Renja SKPD dengan mudah, sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu.

#### **1.2 Landasan Hukum.**

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



- 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Satuan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2010-2014;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 15 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 11);
- 16 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru



Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 14).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya pedoman ini adalah sebagai salah satu fasilitas dan panduan kepada SKPD Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD). Sedangkan tujuan yang ingin di capai adalah untuk mewujudkan Renja-SKPD Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru yang bermutu dan akuntabel, terdiri dari:

1. Tersediannya pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) oleh SKPD Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
2. Memfasilitasi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah.
3. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi Perencanaan pembangunan daerah antara Renja SKPD dengan RPJM Daerah Kota Banjarbaru.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru terdiri dari 4 (empat) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### Bab I       Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### Bab II       Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

#### Bab III      Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.2 Program dan Kegiatan

#### Bab IV      Penutup



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja, Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru pada tahun 2017 memiliki 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan diantaranya adalah :

No	Sasaran	Penanggung Jawab	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
1	Meningkatnya Infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah	Dishub	95,65	Sangat Berhasil
2	Terwujudnya sarana angkutan yang aman dan nyaman	Dishub	96,39	Sangat Berhasil
3	Terwujudnya layanan administrasi yang berkualitas	Dishub	100	Sangat Berhasil
4	Terwujudnya sarana aparatur dan sarana publik yang berkualitas	Dishub	100	Sangat Berhasil
5	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Dishub	100	Sangat Berhasil

Adapun rincian capaian kinerja atas **5 sasaran** dengan kategorinya adalah sebagai berikut:



**1**

**Sasaran :**

***Meningkatnya Infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah***

**Penanggungjawab** atas pencapaian sasaran Meningkatnya ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas tersebut adalah Dinas Perhubungan. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran / Outcome	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	% 2017	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Perbandingan Capaian Kinerja 2017, 2016, dan 2015
1.	Persentase fasilitas Lalu lintas Angkutan jalan yang berfungsi dengan baik	%	100	100	100	100	100	sama
2.	Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum diterminal	%	50	43,48	86,96	80	75	meningkat
3.	Cakupan penyebab kemacetan Lalu lintas yang teratasi	%	100	100	100	95	90	meningkat
Rata-rata capaian					95,65			

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ***Meningkatnya Infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah*** adalah sebesar **95,65%** yang berarti masuk dalam katagori capaian Berhasil yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1. Persentase Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan yang berfungsi dengan baik.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur Jumlah Fasilitas lalulintas (rambu, lampu peringatan, halte) yang direhab dibagi jumlah fasilitas



lalulintas yang akan direhab berdasarkan permintaan masyarakat dikali 100%. Jumlah rambu-rambu yang direhab tahun 2017 sebanyak 20 buah, Lampu Peringatan jalan sebanyak 4 buah dan halte yang direhab sebanyak 3 buah. Dari total rambu, lampu peringatan jalan dan halte yang direhab sebanyak **27 Buah** (20 rambu + 4 lampu peringatan + 3 halte) maka diperoleh perhitungan 27 buah dibagi jumlah fasilitas yang direhab berdasarkan ***permintaan dari masyarakat*** sebanyak **27 buah** (20 rambu + 4 lampu peringatan jalan + 3 halte) maka diperoleh perhitungan  $27/27 \times 100\% = 100\%$ . **Untuk Persentase Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan yang berfungsi dengan baik adalah 100%** Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Tinggi**.

## **2. Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum diterminal.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk menghitung Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum diterminal dengan perhitungan Data jumlah armada yang angkutan umum yang masuk terminal sebanyak **50 armada** dibagi jumlah izin trayek angkutan umum yang dikeluarkan sebanyak **115 armada** dikali **100%**

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator ***Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum diterminal*** pada tahun 2017 adalah  $50/115 \times 100\% = 43,48\%$  dengan target tahun 2017 sebesar **50%** maka diperoleh capaian **43,48% dibagi 50% dikali 100% = 86,96%**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Tinggi**.

## **3. Cakupan penyebab kemacetan Lalu lintas yang teratasi.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur **Cakupan penyebab kemacetan Lalu lintas yang teratasi** di 6 titik lokasi yaitu **Simpang empat banjarbaru, Q mall Banjarbaru, Lampu merah Brimob, Perempatan LIK, KFC, Lampu Merah KM 33 Loktabat.**





Berdasarkan 6 (enam) titik lokasi yang harus di lakukan penanganan penyebab kemacetan lalu lintas maka diperoleh capaian indikator kinerja **Cakupan penyebab kemacetan Lalu lintas yang teratasi** sebanyak **6 titik** lokasi yang telah tertangani dibagi jumlah permintaan titik dari kemacetan dari masyarakat sebanyak **6 titik** dikali 100% maka diperoleh capaian **sebesar 100%**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Tinggi**.

## 2

Sasaran :

***Terwujudnya sarana Angkutan yang aman dan nyaman serta laik jalan***

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran ***Terwujudnya sarana Angkutan yang aman dan nyaman serta laik jalan*** adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran / Outcome	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	% 2017	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Perbandingan Capaian Kinerja 2017, 2016 Dan 2015
1.	Persentase beroperasinya angkutan yang aman dan nyaman	%	80	75%	93,75	90	85	Meningkat
2.	Persentase Kendaraan yang laik jalan	%	85	84,16	99,04	90	90	Meningkat
Rata-rata capaian					96,39			

### 1. Persentase beroperasinya angkutan yang aman dan nyaman.

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur kendaraan angkutan yang beroperasi dengan aman akan meningkatkan rasa aman bagi penumpang. Indikator ini mempunyai perhitungan persentase jumlah pelajar yang terangkut dibagi jumlah permintaan angkutan pelajar dikali 100%.



Berdasarkan data indikator kinerja diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator ***Persentase beroperasinya angkutan yang aman dan nyaman*** tersebut adalah jumlah pelajar yang terlayani angkutan pelajar sebanyak **1.500 orang** dibagi jumlah permintaan angkutan pelajar tahun 2017 sebanyak **2.000 orang** di kali 100%, maka diperoleh **realisasi** capaian sebesar **75%** dengan **target 80%** tahun 2017 maka diperoleh **Persentase Capaian Indikator Kinerja Sebesar 75% dibagi 80% x 100% = 93,75%**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Tinggi**.

## 2. Persentase Kendaraan yang laik jalan.

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur Kondisi kendaraan wajib uji yang laik jalan yang berpengaruh terhadap keselamatan berlalulintas. Indikator Kinerja ini di perhitungkan dari jumlah Kendaraan angkutan orang dan barang yang lulus uji dibagi jumlah kendaraan angkutan orang dan barang wajib uji dikali 100%.

**JUMLAH KENDARAAN YANG DI UJI**  
**MENURUT JENIS KENDARAAN SETIAP TAHUN**  
**TAHUN 2017**

Kota Banjarbaru

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH
<b>A</b>	<b>Umum</b>	
1	Mobil Barang	
	a. Truck	572
	b. Pick Up	310
	c. Tangki	84
2	Mobil Penumpang	



	a. Bus	23
	b. Minibus	166
	a. Angkot/Oplet	31
	b. Sedan	68
3	Tractor Head	7
<b>JUMLAH A</b>		<b>1261</b>
<b>B</b>	<b>Tidak Umum</b>	
1	Mobil Barang	
	a. Truck	641
	b. Pick Up	2.982
	c. Tangki	39
2	Mobil Penumpang	
	a. Bus	22
	b. Minibus	84
3	Tractor Head	6
<b>JUMLAH B</b>		<b>3.774</b>
<b>C</b>	<b>Dinas</b>	
1	Mobil Barang	
	a. Truck	34
	b. Pick Up	43
2	Mobil Penumpang	



	a. Bus	7
	b. Minibus	0
<b>JUMLAH C</b>		<b>84</b>
<b>D</b>	a. Tempelan	0
	b. Mixer	16
<b>JUMLAH D</b>		<b>16</b>
<b>E</b>	<b>JUMLAH A+B+C+D</b>	<b>5.135</b>

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas maka diperoleh perhitungan **Realisasi** jumlah Kendaraan angkutan orang dan barang yang lulus uji tahun 2017 sebanyak **5.135 buah** dibagi **target** jumlah kendaraan angkutan orang dan barang wajib uji tahun 2017 sebanyak **6.100 buah** dikali 100% sama dengan 84,16%. Dari target tahun 2017 yang direncanakan sebesar 85% maka diperoleh Persentase Capaian Indikator Kinerja **Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan** adalah **84,16%** dibagi **85%** = **99,04%**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Tinggi**.



### 3

#### Sasaran :

***Terwujudnya Layanan Administrasi yang berkualitas***

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran ***Meningkatnya konektivitas antar SKPD dengan perangkat daerah lainnya*** tersebut adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran / Outcome	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	% 2017	Realisasi 2016	Realisasi 2016	Perbandingan Capaian Kinerja 2017,2016, Dan 2015
1.	Persentase Layanan Administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	sama
Rata-rata capaian					100			

#### 1. Persentase Layanan Administrasi perkantoran.

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur banyaknya Jumlah layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan dibagi total jumlah layanan perkantoran yang seharusnya ada dikali 100%.

Berdasarkan jumlah layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan tahun 2017 dibagi total jumlah layanan perkantoran yang seharusnya ada di tahun 2017 dikali 100% maka diperoleh **Persentase Layanan Administrasi perkantoran** sebesar **100%**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **SangatTinggi**.



## 4

Sasaran :

***Terwujudnya sarana aparatur dan sarana publik yang berkualitas***

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran **Terwujudnya sarana aparatur dan sarana publik yang berkualitas** tersebut adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Sasaran tersebut terumuskan dalam indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran / Outcome	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	% 2017	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Perbandingan Capaian Kinerja 2017,2016, Dan 2015
1.	Persentase sarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	sama
Rata-rata capaian					100			

### 1. Persentase sarana aparatur dalam kondisi baik.

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur banyaknya Jumlah sarana aparatur dalam kondisi baik dibagi total jumlah sarana aparatur yang dikelola dikali 100%.

Berdasarkan jumlah sarana aparatur dalam kondisi baik pada tahun 2017 dibagi total jumlah sarana aparatur yang dikelola tahun 2017 dikali 100% maka diperoleh **Persentase sarana aparatur dalam kondisi baik** sebesar **100%**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Tinggi**.



**5**

**Sasaran :**

***Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja***

Sasaran tersebut terumuskan dalam indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	% 2017	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Perbandingan Capaian Kinerja 2017,2016, Dan 2015
1.	Persentase temuan pengelola anggaran yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	Sama
Rata-rata capaian					100			

#### **1. Persentase temuan pengelola anggaran yang ditindak lanjuti**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur banyaknya Jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan dikali 100%.

Berdasarkan jumlah temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 dibagi total temuan tahun 2017 dikali 100% maka diperoleh **Persentase temuan pengelola anggaran yang ditindak lanjuti** sebesar **100%**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Tinggi**.



## REALISASI ANGGARAN

Data Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru untuk tahun anggaran 2017 adalah tersaji sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
I.	<b>BELANJA PROGRAM</b>			
	<b>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
	1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000.000	3000.000	100
	2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	79.998.000	61.087.925	76,36
	3. Kegiatan jasa kebersihan kantor	7.200.000	7.200.000	100
	4. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	15.000.000	15.000.000	100
	5. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.999.900	19.999.800	99,99
	6. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	5.600.000	5.599.000	99,98
	7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.200.000	3.200.000	100
	8. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	42.075.800	40.926.400	97,26
	9. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	231.652.476	231.479.508	99,92
	10. Kegiatan Penyediaan jasa non PNS	325.200.000	323.930.000	99,60
	<b>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
	1. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	65.700.000	64.760.000	98,56
	2. Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil jabatan	34.928.000	29.924.550	85,67
	3. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/	249.964.000	228.347.650	91,35





	operasional			
	4. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.600.000	2.600.000	100
	5. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.800.000	10.701.500	99,08
	6. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	24.100.000	24.100.000	100
	7. Pengadaan Peralatan gedung kantor	24.850.000	21.850.000	87,92
	<b>3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	117.450.000	116.060.000	98,81
	<b>4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			
	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	43.800.000	-	-
	<b>5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			
	1. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	38.234.600	38.234.600	100
	2. Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	11.144.900	9.630.800	86,41
	<b>6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>			
	1. Sosialisasi kebijakan di bidang Perhubungan	72.610.900	55.013.300	75,76
	2. Peningkatan pengelolaan Terminal Angkutan Darat	197.589.900	185.250.000	93,75
	3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	115.551.850	49.426.850	42,77
	4. Pelaksanaan Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)	300.000	300.000	100
	<b>7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>			
	1. Rehabilitasi/pemeliharaan Rambu jalan dan Lampu Peringatan	74.207.900	73.422.550	98,94



	2. Rehabilitasi/pemeliharaan Halte/shelter	51.440.000	50.140.000	97,47
	<b>8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>			
	1. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di jalan raya	49.086.250	43.134.250	87,87
	2. Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan	50.764.950	50.476.450	99,43
	3. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan Jasa Angkutan	541.351.050	470.513.550	86,91
	4. Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	48.746.800	46.554.800	95,50
	5. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	3.952.950	3.940.950	99,69
	6. Pemilihan Pelajar Pelopor Berlalu lintas	535.800	535.800	100
	<b>9. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>			
	1. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	212.844.000	181,699,600	85.37
	2. Pengadaan Marka Jalan	223.037.000	209,205,550	93.80
	3. Pengadaan Lampu Peringatan Jalan	192.317.000	186,680,000	97.07
	4. Pengamanan Lalu Lintas Jalan dan Pengawasan	139.369.200	115,192,900	82.65
	5. Pengadaan Water Barrier	158.087.000	181,699,600	96.12
	<b>10. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>			
	1. Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Kendaraan Bermotor	42.210.000	39.690.000	94,02
	2. Pendataan/Pembinaan Usaha Perbengkelan Umum	23.277.500	23.192.500	99,63
	3. Monitoring dan Pembinaan Usaha Perbengkelan Umum	43.872.600	37.584.600	85,66
	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM</b>	<b>3.721.150.326</b>	<b>3.352.740.383</b>	<b>90,10 %</b>



**Alokasi dan realisasi anggaran UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2017**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	630.000	630.000	100
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	27.000.000	20.654.194	76,49
	3. Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	4.200.000	4.200.000	100
	4. Penyediaan alat tulis kantor	3.699.600	3.693.000	99,82
	5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	155.534.500	147.206.200	94,64
	6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.073.000	2.068.100	99,76
	7. Penyediaan makanan dan minuman	10.530.000	9.840.000	93,44
	8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.800.000	1.700.000	94,44
	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	14.092.060	14.091.600	99,99
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.000.000	2.000.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	40.929.500	40.388.100	98,67
3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			



	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	49.250.000	20.475.000	41,57
	<b>TOTAL</b>	<b>311.738.660</b>	<b>266.946.194</b>	<b>78,77 %</b>

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, tugas dan fungsinya dilaksanakan mulai dari tahapan perencanaan hingga evaluasi.

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung organisasi untuk menentukan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sekaligus sebagai tolak ukur kinerja pembangunan di bidang Perhubungan yang diharapkan mampu menjalani tantangan kedepan.

Perencanaan yang akurat, realistis, aplikatif, mantap dan matang, disusun menurut sistem monitoring yang efektif dalam usaha menunjang pembangunan Daerah. Dengan demikian segala usaha dioptimalkan untuk menggali potensi yang ada di dalam dan di luar organisasi dan harapan kedepan kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru semakin Nampak dengan inovasi, kemajuan, juga kualitas.



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 TUJUAN DAN SASARAN

**Tujuan** merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang, tujuan juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi suatu instansi atau organisasi.

**Sasaran** merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam sasaran dirancang juga indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

#### STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program dan kegiatan prioritas .

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan instansi pemerintah.



### **3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tahun 2018 direncanakan sebanyak 10 program dan 35 kegiatan serta 3 program dan 12 kegiatan pada UPT Pengujian Pebengkelan Kendaraan Bermotor. Dalam perencanaan tersebut terdapat penyesuaian terhadap beberapa program kegiatan. Penyesuaian dilakukan untuk menyelaraskan dan mensinergikan program kegiatan dengan tujuan, sasaran dan isu-isu permasalahan yang berkembang. Ikhtisar program kegiatan yang dikelompokkan berdasarkan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tahun 2018 adalah sebagai berikut :



## Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018

### Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

Urusan : Perhubungan

SKPD : Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2018			
		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Terwujudnya layanan administrasi yang berkualitas	Banjarbaru	100%	725.651.100	APBD
1. Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banjarbaru	12 Bulan	79.998.000	APBD
2. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu jasa penyediaan kebersihan kantor	Banjarbaru	12 Bulan	7.200.000	APBD
3. Penyediaan alat tulis kantor	Persentase jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	Banjarbaru	1474 item	15.814.200	APBD
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Banjarbaru	621 item	14.479.800	APBD
5. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Banjarbaru	214 item	4.890.000	APBD
6. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan perundang-	Banjarbaru	628	2.794.600	APBD



Perundang-undangan	undangan		eksemplar		
7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	Banjarbaru	12 Bulan	44.992.500	APBD
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah	Banjarbaru	12 Bulan	217.202.000	APBD
9. Penyediaan Jasa Non PNS	Jumlah tenaga honorarium PTT/Kontrak	Banjarbaru	12 Bulan	338.280.000	APBD
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terwujudnya sarana aparatur dan sarana publik yang berkualitas</b>	<b>Banjarbaru</b>	<b>100%</b>	<b>375.856.972</b>	<b>APBD</b>
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Banjarbaru	5 unit	21.950.000	APBD
2. Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Banjarbaru	45 unit	35.325.000	APBD
3. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	Banjarbaru	12 Bulan	30.527.072	APBD
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara	Banjarbaru	12 Bulan	218.460.000	APBD
5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung	Banjarbaru	5 kali	2.272.400	APBD





gedung kantor	kantor yang dipelihara				
6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Banjarbaru	12 unit	9.962.500	APBD
7. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Banjarbaru	1 Paket	57.360.000	APBD
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase pakaian dinas dan kelengkapannya</b>	<b>Banjarbaru</b>	<b>100%</b>	<b>98.572.000</b>	<b>APBD</b>
1. Pengadaan pakaian dina beserta perlengkapannya	Persentase pakaian dinas dan kelengkapannya	Banjarbaru	63 Stell	98.572.000	APBD
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Banjarbaru</b>	<b>100%</b>	<b>38.281.200</b>	<b>APBD</b>
1. Pendidikan dan pelatihan Non Formal	dokumen perencanaan dan keuangan	Banjarbaru	4 Diklat	38.281.200	APBD
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja</b>	<b>Banjarbaru</b>	<b>100%</b>	<b>34.011.100</b>	<b>APBD</b>
1. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Dokumen Perencanaan dan Keuangan	Banjarbaru	10 Dokumen	34.011.100	APBD
2. Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Inventarisasi Aset/Barang Dishub	Banjarbaru	1 Laporan/Semester	9.788.500	APBD
<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	<b>Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum di terminal</b>	<b>Banjarbaru</b>	<b>55%</b>	<b>77.456.200</b>	<b>APBD</b>
1. Peningkatan pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Jumlah armada angkutan umum yang masuk ke terminal	Banjarbaru	60 armada	53.343.000	APBD
2. Pelaksanaan Penghargaan Wahana Tata Nugraha	Ekspose Wahana Tata	Banjarbaru	1 Kali	24.113.200	APBD



(WTN)	Nugraha				
<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	<b>Persentase Fasilitas Lalu lintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik</b>	<b>Banjarbaru</b>	<b>100%</b>	<b>174.800.000</b>	<b>APBD</b>
1.Rehabilitasi/pemeliharaan Rambu Jalan dan Lampu Peringatan	Terpeliharanya Rambu Lalu lintas dan Lampu Peringatan	Banjarbaru	6 Titik pantau	65.550.000	APBD
2.Rehabilitasi/pemeliharaan Halte/shelter	Jumlah Halte/Shelter yang terpelihara	Banjarbaru	5 Buah	109.25.000	APBD
<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>Persentase pelajar yang memanfaatkan Angkutan gratis</b>	<b>Banjarbaru</b>	<b>50%</b>	<b>1.762.994.000</b>	<b>APBD</b>
1.Pengendalian disiplin pengoperasian Angkutan umum di jalan raya	Pelaksanaan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Banjarbaru	10 Bulan	46.289.000	APBD
2.Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa Angkutan	Pengawasan angkutan orang, angkutan barang dan angkutan lebaran	Banjarbaru	30 Armada	1.634.710.500	APBD
3.Pemilihan dan pemberian Penghargaan Sopir/Juru mudi/Awak kendaraan Angkutan Umum Teladan	Persentase pemilihan sopir/juru mudi angkutan umum teladan	Banjarbaru	1 Kegiatan	43.154.500	APBD
4.Pemilihan Pelajar Pelopor Berkualitas	Jumlah operasional angkutan pelajar	Banjarbaru	1 Kegiatan	38.840.000	APBD
<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas</b>		<b>Banjarbaru</b>	<b>6 Titik Pantau</b>	<b>460.200.500</b>	<b>APBD</b>
1.Pengadaan Rambu-rambu Lalu lintas	Tersedianya Rambu-rambu Lalu Lintas	Banjarbaru	52 Buah	113.236.000	APBD



2. Pengadaan Marka Jalan	Jumlah marka Jalan	Banjarbaru	361 Meter	87.398.000	APBD
3. Pengadaan Lampu Peringatan Jalan	Terpasangnya Lampu Peringatan Jalan	Banjarbaru	6 Titik Pantau	129.966.500	APBD
4. Pengamanan Lalu lintas jalan dan Pengawalan	Terlaksananya pengamanan Lalu Lintas Jalan dan Pengawalan Pejabat Daerah	Banjarbaru	6 Titik Pantau	129.600.000	APBD
<b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>	Jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji	<b>Banjarbaru</b>	<b>6,100 buah</b>	<b>102.522.400</b>	<b>APBD</b>
1. Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Kendaraan Bermotor	Pengawasan dan pembinaan kendaraan wajib uji	Banjarbaru	12 Bulan	39.644.600	APBD
2. Pendataan/pembinaan Usaha Perbengkelan	Pendataan dan pembinaan usaha perbengkelan	Banjarbaru	103 Buah	21.800.200	APBD
3. Monitoring dan Pembinaan Usaha Perbengkelan	Pendataan dan pembinaan usaha perbengkelan	Banjarbaru	103 Buah	41.077.600	APBD



## BAB IV

### PENUTUP

---

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan maupun kepada seluruh pihak terkait, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode selanjutnya. Disamping itu koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan di bidang Perhubungan perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2018 ini masih jauh dari kesempurnaan, segala kritik dan saran demi penyempurnaan Rencana Kerja ini sangat diharapkan.

Banjarbaru, Februari 2018  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Banjarbaru

**AHMAD YANI, S. Sos, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19641102 198903 1 006